



Brussels, 19 Januari 2006
S017/06

Javier SOLANA,
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Keamanan Luar Negeri
bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla

Javier SOLANA, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Keamanan Luar Negeri (CFSP) hari ini bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla.

Perwakilan Tinggi menyambut baik hubungan bilateral yang sangat baik antara Uni Eropa dan Indonesia, yang telah diperkuat dengan kesuksesan keterlibatan Uni Eropa di Aceh melalui Misi Monitoring Aceh (AMM). Bapak Solana menekankan bahwa hal ini memberikan sebuah momentum positif untuk membangun dialog dan kerjasama yang bahkan lebih erat. Rencana untuk sebuah Kesepakatan Kesejawatan dan Kerjasama adalah bukti lebih jauh dari komitmen jangka panjang Uni Eropa terhadap Indonesia.

Pada pertemuan hari ini Perwakilan Tinggi dan Wakil Presiden Yusuf Kalla juga mendiskusikan secara positif tentang kemungkinan perpanjangan mandate AMM, dengan perlu diketahui bahwa keputusan belum diambil oleh setiap pihak. Bapak Solana menggarisbawahi bahwa keinginan politik Uni Eropa akan terus berlanjut untuk memperdalam hubungan Uni Eropa-Indonesia dan untuk mendukung perkembangan keamanan, stabilitas, rekonstruksi dan pembangunan yang berkesinambungan di Aceh.

Bapak Solana juga menghargai peran penting Indonesia dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan memberikan dukungan penuh Uni Eropa untuk kelanjutan proses integrasi kawasan di Asia.

Lampiran: Lembaran fakta Misi Monitoring Aceh



SEKRETARIAT KOMISI UNI EROPA
~LEMBARAN FAKTA~
MISI MONITORING UNI EROPA DI ACEH
(Indonesia)

ACH/03
17 Januari 2006

Pada September 2005 Uni Eropa bersama dengan 5 negara ASEAN yang berkontribusi serta Norwegia dan Switzerland menempatkan sebuah misi pemantauan di Aceh (Indonesia) – Aceh Monitoring Mission (AMM). Misi ini dirancang untuk memantau pengimplementasian berbagai aspek dari kesepakatan perdamaian yang diatur dalam Nota Kesepakatan (MoU) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005. AMM memulai operasionalnya pada 15 September 2005, tanggal dimulainya perlucutan senjata GAM dan penarikan pasukan non organik TNI dan Polri.

Proses Perdamaian

Perundingan-perundingan perdamaian diawali di Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM dibawah naungan Crisis Management Initiative (CMI), sebuah organisasi non-pemerintah yang diketuai oleh mantan presiden Finlandia Martti AHTISAARI.

Sejak Januari 2005, pembicaraan-pembicaraan perdamaian telah berkembang melalui lima tahap perundingan, dimana perundingan terakhir diselesaikan di Helsinki pada 17 Juli 2005. Pada kesimpulan perundingan tahap kelima, pihak-pihak menyepakati sebuah Nota Kesepakatan yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

Uni Eropa telah mendukung perundingan-perundingan proses perdamaian dengan memberikan bantuan langsung melalui **EC Rapid Reaction Mechanism**.

P R E S S

1

Nota Kesepakatan (MoU)

Pemerintah Indonesia dan GAM telah berkomitmen dalam Nota Kesepakatan untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh dan berkelanjutan. Nota Kesepakatan menjelaskan secara lengkap tentang kesepakatan dan poin-poin utama yang membimbing proses perdamaian di Aceh, meliputi hal-hal berikut:

- **Reformasi politik di Aceh** (termasuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh, partisipasi politik, ekonomi dan peraturan perundang-undangan)
- **Hak Asasi Manusia,**
- **Amnesti dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat,**
- **Pengaturan Keamanan** yang sesuai untuk pengimplementasian ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan
- **Pembentukan Aceh Monitoring Mission,** dan
- Kesepakatan sebuah mekanisme untuk penyelesaian persengketaan

Tahap Awal

Pemerintah Indonesia dan GAM telah mengindikasikan bahwa mereka ingin melihat sebuah kehadiran pemantau di Aceh segera setelah penandatanganan Nota Kesepakatan, sebuah Tim Pemantau Awal (Initial Monitoring Presence) ditempatkan pada 15 Agustus 2005. IMP yang terdiri dari 80 pemantau dari Uni Eropa dan ASEAN mengisi periode waktu antara penandatanganan Nota Kesepakatan (15 Agustus 2005) dan penempatan total AMM (15 September 2005)

IMP memberikan pelaksanaan awal dari komitmen Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang berpartisipasi untuk memantau proses perdamaian serta berkontribusi pembangunan kepercayaan di kalangan masyarakat Aceh selama tahap awal pengimplementasian Nota Kesepakatan.

Tahap Akhir

Tahap keempat dan tahap akhir penarikan pasukan non organik TNI dan Polri diselesaikan pada 5 Januari 2006, dengan keberangkatan pasukan non organik polisi dari pelabuhan Lhokseumawe. Selama tahap akhir perelokasian ini, total 7,628 personel TNI dan 2,150 personel polisi telah meninggalkan Aceh. Hal ini membawa ke suatu penyelesaian dari proses perlucutan senjata dan perelokasian pasukan. Sejak 5 Januari 2006 sesuai dengan Nota Kesepakatan jumlah pasukan TNI yang berada di Aceh harus tidak melebihi dari angka 14,700 dan pasukan polisi 9,100.

Pada 19 Desember 2005 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memenuhi komitmennya yang tercantum dalam Nota Kesepakatan dengan menyerahkan jumlah senjata terakhirnya yang ke 840 ke pihak AMM. Pada 20 Desember 2005 kepemimpinan GAM juga mengkonfirmasi secara tertulis bahwa tidak ada lagi senjata dibawah kepemimpinan GAM di Aceh. GAM secara resmi membubarkan sayap militernya (TNA) pada 27 Desember 2005.

Aceh Monitoring Mission (AMM)

Uni Eropa bersama dengan lima negara ASEAN yang berkontribusi (Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) serta Norwegia dan Switzerland, menempatkan sebuah misi pemantau di Aceh (Indonesia). Misi pemantau ini adalah sebuah misi yang **bersifat sipil** dan dipimpin oleh Uni Eropa.

Penempatan AMM adalah kelanjutan atas undangan resmi yang ditujukan kepada Uni Eropa dan 5 negara ASEAN yang berpartisipasi oleh Pemerintah Indonesia. Kepemimpinan GAM juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap misi ini. Misi ini diluncurkan pada 15 September 2005.

Tujuan and Bidang AMM

Tujuan AMM adalah untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan GAM dalam pengimplementasian Kesepakatan Perdamaian. Hal ini meliputi tugas-tugas sebagai berikut:

- Memantau demobilisasi anggota GAM, memonitor dan membantu perlucutan serta penghancuran persenjataan, amunisi dan bahan peledak milik GAM
- Memantau relokasi/penarikan pasukan non organik TNI dan Polisi
- Memantau reintegrasi dari anggota GAM aktif ke dalam masyarakat
- Memantau situasi Hak Asasi Manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini dalam konteks sesuai dengan tugas-tugas yang ditetapkan dalam poin tersebut diatas
- Memantau proses perubahan perundang-undangan
- Memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan
- Menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepakatan ini
- Membangun dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak

AMM tidak memfasilitasi ataupun berperan dalam perundingan. Jika hal ini diperlukan selama dalam proses pengimplementasian, hal tersebut akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dan fasilitator awal yaitu Crisis Management Initiative (CMI).

Ukuran dan struktur Misi

AMM adalah sebuah misi sipil dalam bagan kerja **Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Eropa (European Security and Defence Policy - ESDP)**. Komite Keamanan dan Politik Uni Eropa (The EU's Political and Security Committee - PSC) melakukan pengendalian politik dan pengarahan strategis Dewan Uni Eropa. Biaya misi ini dikeluarkan dari anggaran Uni Eropa (jumlah acuan untuk misi ini dibawah anggaran Kebijakan Keamanan Luar Negeri Uni Eropa adalah 9 juta Euro)

dan juga melalui kontribusi negara-negara anggota Uni Eropa dan negara-negara yang berpartisipasi (6 juta Euro)

Jumlah anggota internasional tidak bersenjata dari AMM adalah 226, dimana 130 berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa serta Norwegia dan Switzerland, dan 96 personel dari negara-negara ASEAN yang berpartisipasi. Misi ini terdiri dari anggota-anggota dengan keahlian yang sesuai dengan bidang yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas AMM.

Markas Besar dan tim-tim pemantau terdiri dari anggota-anggota dari Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang berpartisipasi serta Norwegia dan Switzerland. Anggota AMM mengenakan pakaian sipil yang dapat dikenali dengan tanda identitas misi yang jelas.

Misi yang bermarkas di Banda Aceh ini membentuk sebuah kapabilitas pemantauan melalui 11 Kantor Wilayah yang tersebar secara geografis untuk menunjukkan dukungan dan komitmen Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang berpartisipasi di seluruh Aceh. Misi ini juga memiliki 4 tim perlucutan senjata yang berpindah-pindah, 26 anggota perlucutan senjata telah ditarik pada akhir tahun 2005. Anggota AMM melakukan tugas pemantauannya dengan berpatroli dan berkomunikasi dengan kedua belah pihak, serta mengadakan inspeksi dan investigasi jika diperlukan.

Ketua Misi (HoM) Pieter Feith, diutus oleh Sekretariat Dewan Uni Eropa dan dibantu oleh 3 wakil, dua dari Uni Eropa dan satu dari ASEAN.

Misi/aksi gabungan ini (keputusan Dewan Uni Eropa mendirikan misi) akan berakhir pada 15 Maret 2006.

Laporan

Ketua Misi (HoM) melapor kepada Javier Solana, Sekretaris Jenderal/Perwakilan Tinggi Dewan Uni Eropa dalam segala urusan yang berhubungan dengan AMM, dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yaitu CMI, PSC dan negara-negara ASEAN yang berpartisipasi tentang kemungkinan pelanggaran dari Nota Kesepakatan.

Uni Eropa dan Indonesia

Uni Eropa telah mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibutuhkan di negara-negara yang terkena bencana Tsunami. 200 juta Euro telah dijanjikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi Indonesia selama tahun 2005-2006. Tambahan kontribusi dari negara-negara anggota Uni Eropa yang direncanakan adalah 391 juta Euro. Kantor Komisi Uni Eropa untuk Koordinasi Kemanusiaan (The European Commission Humanitarian Co-ordination Office-ECHO) telah menyalurkan 40 juta Euro untuk bantuan pemulihan bagi korban-korban Tsunami.

Diluar bantuan Tsunami total bantuan Uni Eropa (EC+25) berjumlah 200 juta Euro per tahun. Sebagai tambahan "*Country Strategy Paper*" dari Komisi Eropa untuk Indonesia (periode 2002-2006) memprediksi komitmen lebih dari 215 juta Euro meliputi sektor-sektor pembangunan yang

berbeda dalam periode waktu tersebut. Pendistribusian-pendistribusian yang disebutkan pada 2005 untuk Indonesia adalah 75 juta Euro.

Komisi Eropa akan mendukung proses perdamaian di Aceh lebih jauh melalui langkah-langkah berikutnya termasuk dukungan untuk reintegrasi mantan pejuang GAM ke dalam masyarakat sipil dan kehidupan politik yang demokratis; dukungan bagi masyarakat yang terlantar akibat konflik dan dukungan kepada masyarakat yang kembali dari negara ketiga; misi pengamatan pemilu Uni Eropa untuk pemilu lokal 2006; bantuan teknis dan pembangunan kapasitas untuk membantu polisi lokal dan sistem peradilan sipil khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, peningkatan administrasi masyarakat daerah, dan bantuan bagi organisasi-organisasi pemilu lokal.

Uni Eropa telah mengkonfirmasi komitmennya terhadap persatuan negara Indonesia yang demokratis, stabil dan sejahtera. Uni Eropa menyatakan kembali penghormatannya terhadap integritas wilayah Republik Indonesia dan menyadari pentingnya Indonesia sebagai rekan yang besar.

Referensi lebih lanjut:

http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/indonesia/intro/index.htm

<http://ue.eu.int/aceh>

<http://www.aceh-mm.org>
